BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris di mana pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Pertanian merupakan sumber penyedia kebutuhan pangan. Selain sebagai penyedia kebutuhan pangan, sektor pertanian juga sebagai penyedia bahan baku industri (Kusumawardhani, 2017). Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional, oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional abad ke-21 masih akan tetap berbasis pertanian secara luas (Saragih, 2010).

Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia untuk pembentukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, penghasil devisa, dan tempat bergantung sebagian besar penduduk pedesaan. Peran ini masih sangat besar dan cenderung bertambah di masa yang akan datang, karena pertanian menjadi tumpuan untuk penyediaan pangan yang makin banyak dan beragam (*food*), pakan yang semakin bertambah (*feed*), dan energi alternatif (*fuel*). Pembangunan yang telah dilaksanakan sampai saat ini belum banyak mengubah keadaan pertanian Indonesia. Masalah klasik masih menghambat laju pembangunan pertanian seperti skala ekonomis dan teknis yang belum tercapai, alih fungsi lahan (subur) yang terus berlangsung, tataniaga yang masih sangat panjang, keragaman produk yang belum dikelola dengan baik, fluktuasi harga yang besar, infrastruktur yang terbatas, dan perubahan iklim yang semakin mengancam. Semua masalah ini berujung pada rendahnya daya saing produk pertanian dan ketahanan pangan nasional (Tajuddin, 2014).

Sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional, karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan terutama di wilayah pedesaan menjadi fokus pembangunan pertanian karena sektor pertanian menjadi basis pertumbuhan ekonomi pedesaan. Dalam pembangunan nasional terdapat berbagai aspek didalamnya, salah satunya adalah pembangunan nasional dalam bidang pertanian yang sering disebut pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian di

Indonesia ini perlu ditingkatkan karena dirasa belum bisa mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka diperlukan peningkatan pembangunan pertanian.

Meningkatkan pembangunan pertanian dapat dilakukan dengan pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani salah satunya yaitu dengan cara korporasi pertanian. Dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2017 yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo bahwa:

"Tidak bisa lagi kita biarkan petani itu berjalan sendiri-sendiri. Tidak bisa! Rakyat harus diorganisir, petani harus diorganisir, kenapa korporasi bisa menjual produk dengan sangat murahnya? Karena skala ekonomi yang besar. Kenapa mereka bisa lebih efisien? Karena mereka memproduksi dalam jumlah massal, dalam jumlah banyak. Petani pun juga bisa seperti itu"

Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tersebut ditintaklanjuti dalam rapat terbatas pada September 2107 yang dihadiri oleh Mentri BUMN, Mentri Desa dan PDTT, Mentri Pertanian, Dirut Himbara, Dirut Telkom, Dirut Pupuk Indonesia, dan Dirut Bulog dan menghasilkan beberapa keputusan yaitu:

1. Dalam rangka membuat kluster percontohan "korporatisasi petani", perlu dilakukan identifikasi terhadap petani/kelompok tani/koperasi dengan luas areal per kluster lebih kurang 4.000 ha dan para petaninya sudah mendapat kartu tani dari Himbara;
2. Investasi dalam kluster tersebut paling tidak berupa: *Rice Milling Unit* (RMU), *Dryer*, *Tractor* serta sarana dan prasana tanam;
3. Pemerintah/BUMN akan membantu investasi sarana dan prasarana tersebut;
4. Model bisnis yang dibentuk: PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN) membentuk *Joint Venture* dengan BUMDes dan Kelompok Tani/Koperasi, MBN menjadi pemegang saham mayoritas (minimal 51%) kepemilikan sahamnya, sisanya sebesar maksimal 49% akan dimiliki BUMDes dan Kelompok Tani/Koperasi;
5. *Pilot Project* akan dilakukan di wilayah Jawa Barat dengan pembagian tanggungjawab BUMN nya sebagai berikut: Karawang – PICH; Purwakarta

– BTN; Cianjur – RNI; Garut – BNI; Ciamis – Mandiri; Sumedang – Telkom; Majalengka – Bulog; Tasikmalaya – BRI

6. Tugas BUMN pada awalnya adalah melakukan survey untuk identifikasi petani/kelompok tani sampai dengan areal lebih kurang 4.000 ha, luasan ini bisa men-*suply* satu *Rice Milling Unit*, konsep kelembagaan akan didesain dengan PT Mitra BUMDes Nusantara, *Joint Venture* dengan BUMDes dan Petani/Kelompok Tani/Koperasi
7. Pemerintah (Kementan) akan memberikan bantuan alat mesin pertanian dan RMU nya (*On Farm*, 2017).

Korporasi pertanian adalah penerapan pengelolaan pertanian secara korporat (*corporate farming*) yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani. *Corporate farming* adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan dengan tetap menjamin kepemilikan lahan pada masing-masing petani, sehingga efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemanfaatan sumber daya dapat dicapai (Dinas Pertanian,2000). Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani (Permentan No. 18 tahun 2018) Korporatisasi pertanian dalam penerapannya bertujuan untuk mendorong petani yang pada awalnya hanya berusahatani secara individual (*one on one* farming) menjadi berkelompok (clutser) dalam mengelola pertaniannya. Korporatisasi pertanian menjadikan petani yang biasanya mengelola pertaniannya secara tradisional dan hanya berorientasi pada budidayanya saja menjadi kelompok petani yang mengelola pertaniannya secara modern dan berorientasi wirausaha.

Konsep korporatisasi pertanian terfokus pada tanaman pangan. Selama ini komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani selalu diproduksi secara terpecah-pecah dengan luas lahan yang kecil sehingga produksi pangan tidak bisa dikelola secara produktif. Korporatisasi pertanian juga bertujuan untuk memotong atau memangkas saluran tata niaga yang panjang dalam penjualan hasil pertanian .dalam korporatisasi ini petani akan dibentuk dalam satu kelompok atau kluster, dimana

satu kluster hanya memiliki satu saluran tataniaga dan tidak ditemukan lagi pedagang-pedagang perantara yang akan menekan harga pada petani.

Keberadaan program kerja korporatisasi pertanian ini, dapat membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraannya. Program korporatisasi pertanian ini diadakan di 9 (Sembilan) titik yang berbeda sebagai daerah *piloting project*, Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu titik dari 9 (Sembilan) titik Kabupaten/Kota lokasi *piloting* pelaksanaan program Korporatisasi Pertanian.

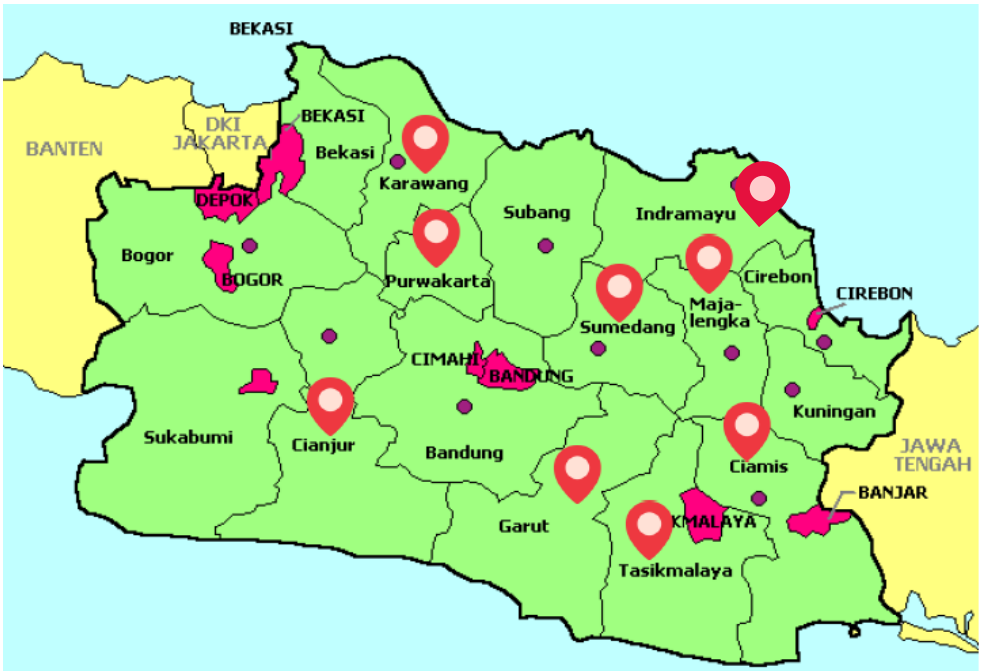

Gambar 1. Lokasi *piloting project* korporatisasi pertanian

Sumber: PT. Mitra Bumdes Nusantara, 2017.

Berdasarkan data statistik BPS, penyumbang terbesar PDB Kabupaten Tasikmalaya adalah sektor pertanian dengan angka Rp. 7.395.906,32 miliar. Dan subsektor tanaman pangan adalah yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Tasikmalaya, dibuktikan dengan lahan pertanian paling luas di Kabupaten Tasikmalaya yaitu lahan sawah seluas 51.072 ha dengan luas panen 137.661 ha (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2017).

Kawasan Korporatisasi Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya mencakup tiga Kecamatan yaitu, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Sukaratu dan Kecamatan Sukahening. Pada tiga Kecamatan ini terdapat 28 gapoktan yang tergabung menjadi satu kluster korporasi petani dengan luas lahan sebesar 4.511 ha, dan 8.036 orang petani di kluster ini, bergabung dalam gapoktan yang diberi nama Gapoktan Cisuka-Galunggung yang sudah berbadan hukum.

Tabel 1. Data Gapoktan Cisuka-Galunggung

	Kec. Cisayong	Kec. Sukaratu	Kec. Sukahening
Petani	3.863	3.090	1.083
Poktan	68	48	27
Gapoktan	13	8	7
Luas lahan	1.745	1.840	926
Kartu tani (telah di bagikan)	3.512	3.012	1.008

Sumber: PT Mitra Desa Bersama Cisuka (Posisi per 31 Oktober 2018)

Program korporatisasi pertanian ini melibatkan banyak pihak dan Lembaga yang ikut dalam berjalannya program korporatisasi pertanian ini. Lembaga yang dibentuk BUMN untuk menjalankan program ini adalah PT. Mitra BUMDes Nusantara (PT. MBN). Dalam menjalankan program korporatisasi pertanian ini PT. Mitra BUMDes Nusantara mendirikan anak perusahaan di setiap titik *pilot project* yang telah di tentukan. Untuk Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan salah satu titik *pilot project* program korporatisasi pertanian ini, PT. Mitra BUMDes Nusantara mendirikan anak perusahaan dengan Gapoktan Cisuka-Galunggung yaitu PT. Mitra Desa Bersama Cisuka (PT. MDB Cisuka). Tujuan dari PT. MDB ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga jual dan menjaga kestabilan persediaan padi pada daerah korporatisasi pertanian.

Fungsi dari BRI yaitu sebagai pembina dan penanggungjawab dari PT. MDB Cisuka untuk mendukung kesuksesan berjalannya kegiatan korporatisasi pertanian yang dijalankan ini. BRI juga berperan dalam membantu petani yang bermitra dengan PT. MDB Cisuka dengan memberikan KUR (kredit usaha rakyat) kepada petani melalui rekomendasi dari PT. MDB Cisuka.

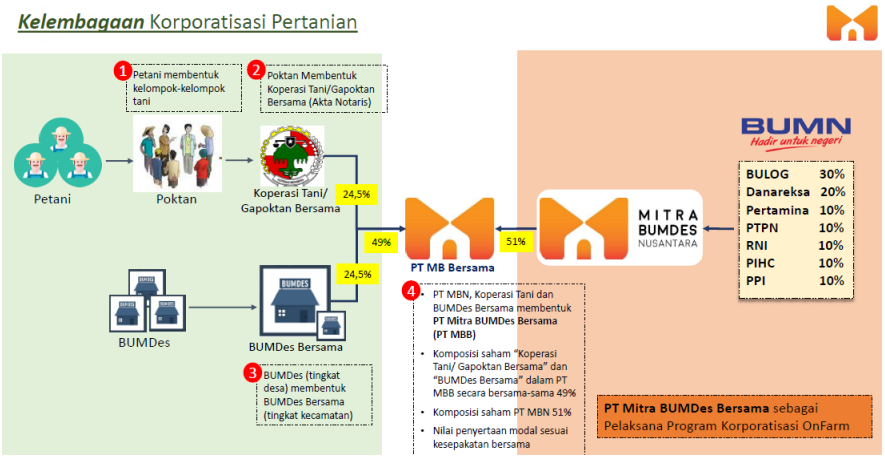

Gambar 2. Kelembagaan Korporatisasi Pertanian

Sumber: PT. Mitra Bumdes Nusantara, 2017.

Sebagai salah satu Lembaga yang berperan dalam korporatisasi pertanian ini PT. MDB Cisuka memiliki fasilitas alat dan perlengkapan yang modern dalam menunjang program ini. Tujuan dibentuknya PT. MDB Cisuka ini ialah untuk menigkatkan kesejahteraan petani dan untuk stabilitas harga jual gabah. Peran PT. MDB Cisuka ialah sebagai *off taker* gabah dari petani dimana PT.MDB Cisuka membeli langsung gabah dari petani yang bermitra dengan PT. MDB Cisuka., memberikan sosialisasi kepada petani mengenai penggunaan pupuk non-subsidi, menyediakan sembako dengan harga lebih murah, yang dapat dikonsumsi sendiri oleh petani ataupun dijual kembali, untuk pembayaran dari sembako juga dapat dibayar saat setelah panen (yarnen), akses dalam memperoleh KUR .

Peran PT. MDB Cisuka sebagai *off taker* gabah padi dapat memangkas mata rantai tata niaga yang panjang karena tidak melalui pedagang -pedagang perantara yang ada. Gabah yang diterima dari petani diolah menjadi beras dengan peralatan yang dimiliki oleh PT. MDB Cisuka. Dengan dilakukannya kegiatan itu maka skala dan persediaan beras untuk daerah yang termasuk dalam program korporatisasi pertanian dapat terpenuhi dan terpusat, sesuai dengan konsep korporatisasi pertanian.

Dengan keuntungan yang akan diperoleh petani, seharusnya dapat meningkatkan keinginan petani untuk menjual gabah dan bermitra dengan PT.

MDB Cisuka. Dengan menjual gabah langsung ke PT. MDB Cisuka itu akan mengurangi sifat spekulatif pedagang pengepul yang dapat mendistribusikan hasil panen ke luar daerah dengan harga yang lebih tinggi sehingga pedagang pengepul lah yang akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Demi mengurangi spekulatif pedagang pengepul, salah satunya melalui program kemitraan agribisnis yang dijalankan oleh PT. MDB cisuka.

Kenyataan yang terjadi dilapangan ialah banyak petani yang tidak menjual gabahnya kepada PT. MDB Cisuka degan alasan banyak persyaratan, dengan dibentuknya program dari PT. MDB Cisuka diharapkan dapat menyerap gabah di daerah titik korporatisasi pertanian tetapi pada kenyataanya PT. MDB Cisuka lebih banyak menyerap gabah dari luar daerah korporatisasi.

Secara politis dari sisi pembangunan pertanian, program kemitraan agribisnis merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan petani dan pengurangan kesenjangan ekonomi antara perusahaan berskala agroindustri dan petani kecil. Dalam hal ini diharapkan akan banyak petani yang akan menjual gabahnya ke PT. MDB Cisuka daripada ke tengkulak yang belum pasti harga dan kapan akan dibayar gabahnya, tetapi pada kenyataan masih banyak petani yang tidak mau menjual gabahnya kepada PT. MDB Cisuka.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah efektif atau tidak program kemitraan yang dijalankan oleh PT.MDB Cisuka dengan petani dan bagaimanakah pola kemitraan yang dijalankan oleh PT. MDB Cisuka pada kenyataanya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah di paparka, maka dalam penelitian ini penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola kemitraan antara PT. Mitra Desa Bersama Cisuka dengan gabungan kelompok tani padi Cisuka Galunggung?
2. Bagaimanakah efektivitas program kemitraan antara PT. Mitra Desa Bersama Cisuka dengan petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani padi Cisuka Galunggung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola kemitraan yang sebenarnya terjadi antara PT. Mitra Desa Bersama Cisuka dengan gabungan kelompok tani Cisuka Galunggung.
2. Untuk mengetahui efektivitas program kemitraan atara PT. Mitra Desa Bersama Cisuka dengan petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani Cisuka Galunggung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak anatara lain:

1. Bagi peneliti, yaitu sebagai tambahan pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai pola-pola kemitraan serta efektivitas kemitraan yang ada, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi PT. Mitra Desa Bersama Cisuka, yaitu sebagai bahan pertimbangan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan.
3. Bagi petani, yaitu sebagai bahan informasi untuk melaksanakan kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan.
4. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan program-program yang akan dibuat selanjutnya.